

## **ABSTRAK**

Gagasan Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, tidak menerima honorarium dari Negara, akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya sesuai Pasal 36 ayat (2) UUJN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN terhadap notaris yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma, untuk menemukan dan menganalisis kendala dalam penerapan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UUJN dalam pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan kepada orang tidak mampu oleh notaris di Kabupaten Brebes. Metode yang digunakan yuridis empiris berlokasi pada Kabupaten Brebes. Sampel dalam penelitian ini yaitu notaris yang berada di Kabupaten Brebes.

Dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan Implementasi Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 didasari beberapa hal, yaitu Segi kemanusiaan, Segi kejujuran dari penghadap sebagai klien, Segi keyakinan notaris. Problematika yang dihadapi dalam pemberian jasa hukum meliputi Kurangnya sosialisasi, Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah. Akibat hukum dalam pelaksanaan jasa hukum bidang Kenotariatan, notaris mempunyai tanggung jawab yang besar.

Kata kunci: jasa hukum, cuma-cuma, notaris,

## **ABSTRACT**

*The idea The legal state demands that the administration of the state and the government be based on the law and provide assurance of certainty to the basic rights of the people as stipulated in the law.*

*Notary as a public official appointed by the state, does not receive honorarium from the State, but receives honorarium for legal services granted in accordance with its authority in accordance with Article 36 paragraph (2) UUJN.*

*The purpose of this study is to analyze the meaning of Article 37 paragraph (1) and (2) UUJN against notaries that provide free legal services, to find and analyze obstacles in the application of Article 37 paragraph (1) and (2) UUJN in the provision of services law in the field of notarial to the disadvantaged by a notary in Brebes County.*

*The results of research conducted on the implementation of Article 37 paragraph (1) and paragraph (2) UUJN No. 2 of 2014 based on several things, namely human aspects, honesty aspects of the customer as a client, notary note. The problems faced in the recognition of legal services access socialization, Supervision carried out by MPD, MPW, and MPP are low. Legal consequences in the implementation of the Notary Public legal services, the notary has a large responsibility.*

*Keywords: legal services, free of charge, notary*